



Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Optimalisasi Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Lando Kecamatan Terara

Ulya Zakiya Tazkiya^{1*}, Anisa Rosmayani², Dian Wahyu Utami³, Riatul Ma'wa⁴, Muhammad Rifqi Maulana⁵, Evilia Rochmi⁶

Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan¹, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris^{2,3,4,5}, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia⁶

Universitas Hamzanwadi

e-mail: tazkiyaulyazakiya@gmail.com

Abstrak

This community service program aimed to assist the implementation of the Village Information System (VIS) to optimize administrative services at the Lando Village Office, Terara District, East Lombok Regency. A descriptive qualitative approach was employed through needs assessment, observation, interviews, implementation assistance, and evaluation. Data were collected from the village head, village officials, VIS operators, and activity documentation. The results indicate that the implementation of VIS improved administrative service efficiency, enhanced the accuracy of population data, facilitated digital document management, and strengthened public service transparency. The assistance program also improved the digital competencies of village officials in operating the system. Supporting factors included government commitment, technological infrastructure, staff competence, and community participation, while limited digital literacy, unstable internet connectivity, and budget constraints remained the primary challenges. Continuous assistance is recommended to maximize the sustainability of VIS implementation and improve the quality of village administrative services.

Kata Kunci: *Village Information System, Administrative Services, Digitalization.*

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi di Kantor Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan analisis kebutuhan, observasi, wawancara, pendampingan implementasi, dan evaluasi. Data diperoleh dari Kepala Desa, perangkat desa, operator SID, serta dokumentasi kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi SID meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi, akurasi data kependudukan, efisiensi pengarsipan dokumen, serta transparansi pelayanan publik. Pendampingan juga meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem berbasis digital. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat, sedangkan hambatan utama meliputi keterbatasan literasi digital, ketidakstabilan jaringan internet, dan keterbatasan anggaran. Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SID dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Desa, Pelayanan Administrasi, Digitalisasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pendukung administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep tersebut selaras dengan implementasi *electronic government (e-government)*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah (Indrajit, 2016). Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi pada tingkat pemerintahan desa adalah penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Sistem informasi merupakan suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas organisasi (Kadir, 2018; Mulyadi, 2016). Dalam konteks pemerintahan desa, SID berfungsi sebagai media pengelolaan administrasi pemerintahan, pengolahan data kependudukan, pelayanan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Implementasi SID juga menunjukkan adanya pergeseran dari pola administrasi konvensional menuju pengelolaan pemerintahan berbasis data dan teknologi, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan efektivitas pelayanan administrasi desa (Aulia & Prasetyo, 2023; Fadilah & Hidayat, 2022).

Penerapan SID juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya pengelolaan informasi desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menyediakan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dalam perkembangannya, digitalisasi pemerintahan desa juga tidak hanya diarahkan pada penyimpanan data, tetapi menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik di wilayah perdesaan (Wahyuni & Nugroho, 2022).

Pelayanan administrasi merupakan salah satu fungsi utama pemerintah desa yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya pelayanan, tetapi juga dari ketepatan, kemudahan prosedur, kepastian

pelayanan, transparansi, dan kemampuan aparatur dalam memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat (Hardiansyah, 2018). Sementara itu, Sedarmayanti (2018) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menuntut seluruh instansi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, penerapan SID menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepada masyarakat (Saputra & Wibowo, 2021).

Meskipun demikian, masih banyak pemerintahan desa yang menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi. Sistem administrasi yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lamanya proses pelayanan, tingginya risiko kesalahan pencatatan data, duplikasi arsip, kesulitan dalam pencarian dokumen, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi administrasi desa. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik melalui SID menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada proses administrasi manual sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan (Fadilah & Hidayat, 2022).

Implementasi SID diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui digitalisasi proses administrasi. Penggunaan sistem berbasis teknologi memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara lebih sistematis, mempercepat proses pelayanan administrasi, meningkatkan akurasi data kependudukan, mempermudah pengarsipan dokumen, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengalaman implementasi SID di berbagai konteks pemerintahan desa menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan administrasi sekaligus mendorong perubahan pola kerja aparatur menjadi lebih efektif dan berbasis data (Aulia & Prasetyo, 2023; Saputra & Wibowo, 2021). Selain meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi juga mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih profesional.

Namun demikian, keberhasilan implementasi SID tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kesiapan sumber daya manusia, dukungan pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kapasitas anggaran, serta tingkat literasi digital masyarakat. Implementasi e-government pada pemerintahan desa merupakan proses yang membutuhkan kesiapan organisasi dan kemampuan aparatur dalam mengadopsi perubahan teknologi. Berbagai tantangan tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan sistem informasi apabila tidak disertai dengan dukungan kelembagaan, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Indrajit, 2016;

Rahman et al., 2023). Oleh karena itu, implementasi SID memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat desa.

Pendampingan implementasi SID menjadi penting karena keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem, tetapi juga pada kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem tersebut secara efektif. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi SID diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Hal tersebut sejalan dengan kajian mengenai transformasi digital administrasi desa melalui OpenSID yang menunjukkan bahwa teknologi perlu didukung oleh kapasitas aparatur, tata kelola organisasi, dan pendampingan teknis agar dapat memberikan manfaat yang optimal (Kurniawan & Sari, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, menganalisis kontribusi SID terhadap optimalisasi pelayanan administrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi berbasis teknologi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik digitalisasi pemerintahan desa di Indonesia.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan proses implementasi Sistem Informasi Desa (SID) serta menganalisis kontribusinya terhadap optimalisasi pelayanan administrasi di Kantor Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek kegiatan. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui eksplorasi pengalaman, persepsi, dan kondisi yang terjadi dalam konteks alamiah. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Moleong (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara holistik dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi Tahun 2026. Sasaran kegiatan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, operator Sistem Informasi Desa (SID), perangkat desa, serta masyarakat yang memanfaatkan pelayanan administrasi di Kantor Desa Lando.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu analisis situasi dan kebutuhan, perencanaan program, pendampingan implementasi Sistem Informasi Desa, serta evaluasi kegiatan.

Tahap pertama adalah analisis situasi dan kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi pelayanan administrasi yang sedang berjalan, kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelayanan publik. Selain observasi, dilakukan pula wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, operator SID, dan beberapa perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, alur pelayanan administrasi, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan Sistem Informasi Desa. Menurut Sugiyono (2019), observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dalam memperoleh informasi yang mendalam mengenai kondisi lapangan, sedangkan Arikunto (2019) menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti memperoleh data faktual mengenai aktivitas yang sedang berlangsung.

Tahap kedua adalah perencanaan program pendampingan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim menyusun rencana kegiatan yang meliputi penyusunan jadwal pendampingan, identifikasi kebutuhan perangkat pendukung, penyusunan materi pelatihan, serta penentuan strategi implementasi SID yang disesuaikan dengan kondisi Desa Lando.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan pendampingan implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Pada tahap ini tim pengabdian mendampingi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem, melakukan penginputan data kependudukan, pengelolaan arsip digital, pelayanan administrasi berbasis sistem informasi, serta memberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan fitur-fitur SID.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi SID terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung (Sugiyono, 2019; Moleong, 2018). Seluruh data kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi Sistem Informasi Desa dalam mendukung optimalisasi pelayanan administrasi di Kantor Desa Lando.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Lando Kecamatan Terara

Pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Lando merupakan salah satu bentuk upaya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini

dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan transparan. Konsep tersebut sejalan dengan implementasi electronic government (e-government), yaitu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Indrajit, 2016). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan SID dapat dipandang sebagai bentuk konkret transformasi digital karena teknologi digunakan tidak hanya untuk menyimpan data, tetapi juga untuk mendukung proses pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan.

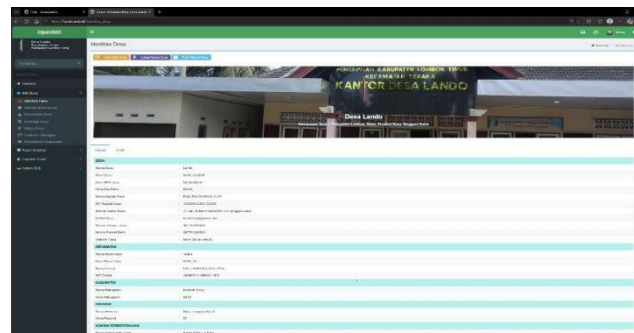
Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang berfungsi mengintegrasikan pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi, dokumentasi, serta penyediaan informasi publik dalam satu basis data yang terorganisasi. Menurut Kadir (2018), sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mulyadi (2016) yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen berfungsi meningkatkan efektivitas organisasi melalui penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan relevan. Implementasi SID dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan antara teknologi, sumber daya manusia, prosedur administrasi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama kegiatan pengabdian, implementasi SID di Kantor Desa Lando telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai jenis pelayanan administrasi, antara lain pengelolaan data kependudukan, penerbitan surat keterangan domisili, surat pengantar Kartu Keluarga, surat pengantar akta kelahiran, surat keterangan usaha, serta berbagai dokumen administrasi lainnya. Seluruh data masyarakat tersimpan dalam basis data digital sehingga aparatur desa tidak lagi melakukan pencarian dokumen secara manual. Kondisi tersebut mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi risiko kehilangan maupun duplikasi data administrasi. Temuan ini sejalan dengan Aulia dan Prasetyo (2023) yang menempatkan implementasi Sistem Informasi Desa sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saputra dan Wibowo (2021) yang membahas efektivitas implementasi Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Desa Lando, manfaat tersebut terlihat pada berkurangnya ketergantungan aparatur terhadap pencarian arsip secara manual dan meningkatnya kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa SID dapat berfungsi sebagai instrumen administratif sekaligus sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Implementasi SID di Desa Lando juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi mengenai prosedur pelayanan administrasi, persyaratan dokumen, serta data pelayanan dapat diakses secara lebih terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi sebelum mengajukan pelayanan administrasi. Transparansi tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan good governance karena mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik (Sedarmayanti, 2018). Kondisi ini juga memperlihatkan fungsi SID sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di wilayah perdesaan, sebagaimana dibahas oleh Wahyuni dan Nugroho (2022).

Selama proses pendampingan, aparatur desa juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi. Kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data yang akurat, keamanan data administrasi, serta pemanfaatan teknologi sebagai pendukung pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi SID karena kualitas sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya.



Gambar 1. Website SID Kantor Desa Lando

Secara keseluruhan, implementasi Sistem Informasi Desa di Kantor Desa Lando menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan yang lebih cepat, pengelolaan data yang lebih akurat, pengarsipan yang lebih sistematis, serta penyediaan informasi publik yang lebih transparan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa SID bukan hanya berfungsi sebagai perangkat teknologi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung modernisasi pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Temuan tersebut sejalan dengan Wahyuni dan Nugroho (2022) yang menempatkan Sistem Informasi Desa sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di wilayah perdesaan. Selain itu, transformasi administrasi melalui platform seperti OpenSID menunjukkan bahwa optimalisasi teknologi dalam pemerintahan desa perlu didukung oleh kapasitas aparatur dan tata kelola yang memadai (Kurniawan & Sari, 2024).

Faktor Pendukung Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Lando Kecamatan Terara

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Lando tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta dukungan para pemangku kepentingan. Implementasi sistem informasi pada sektor publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan perubahan budaya kerja, penyesuaian prosedur pelayanan, dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pelayanan desa memerlukan sinergi antara aspek teknologi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat (Indrajit, 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama kegiatan pendampingan, terdapat beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi SID di Kantor Desa Lando, yaitu dukungan pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi aparatur desa, koordinasi antaraparatur, serta partisipasi masyarakat.

Faktor pertama adalah komitmen pemerintah desa dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi. Kepala desa dan seluruh perangkat desa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemanfaatan SID sebagai media peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendukung, pemberian kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pelatihan, serta kebijakan yang mendorong penggunaan SID dalam seluruh proses pelayanan administrasi. Menurut Sedarmayanti (2018), kepemimpinan yang berorientasi pada inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi karena mampu menciptakan lingkungan organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Faktor kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi. Implementasi SID di Desa Lando didukung oleh ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, serta basis data administrasi yang memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara digital. Infrastruktur teknologi yang memadai menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik karena seluruh proses administrasi bergantung pada kelancaran operasional sistem informasi. Kadir (2018) menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem informasi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur kerja, dan pengguna sistem.

Faktor ketiga adalah kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang bertugas mengoperasikan SID. Selama proses pendampingan, aparatur desa menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola data kependudukan, mengoperasikan fitur-fitur sistem, serta memberikan pelayanan administrasi berbasis digital kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi tersebut diperoleh melalui praktik langsung, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Indrajit (2016)

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem.

Faktor pendukung berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa Lando menunjukkan respons yang positif terhadap penerapan SID karena sistem tersebut memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kesiapan masyarakat untuk melengkapi data administrasi serta mengikuti prosedur pelayanan berbasis digital turut memperlancar implementasi sistem. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah desa.



Gambar 3. Proses Input Data Penduduk Pada SID di Kantor Desa Lando

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian terbaru mengenai transformasi digital melalui OpenSID yang menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kapasitas aparatur desa, dukungan kelembagaan, tata kelola organisasi, serta keberlanjutan pendampingan teknis (Kurniawan & Sari, 2024). Temuan tersebut relevan dengan kondisi Desa Lando, karena proses pendampingan secara langsung membantu aparatur mengembangkan kemampuan dalam menggunakan sistem dan menyesuaikan prosedur kerja dengan kebutuhan pelayanan berbasis digital.

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Lando Kecamatan Terara

Meskipun implementasi Sistem Informasi Desa memberikan berbagai manfaat terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi penerapan sistem di Kantor Desa Lando. Hambatan tersebut berasal dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, anggaran, maupun kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan berbasis digital.

Menurut Indrajit (2016), implementasi e-government pada sektor publik umumnya menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur teknologi, lemahnya dukungan organisasi, serta keterbatasan pembiayaan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pelaksanaan SID di Desa Lando. Hal ini sejalan dengan Rahman et al. (2023) yang mengidentifikasi bahwa adopsi e-government dalam administrasi

desa dapat menghadapi berbagai tantangan organisasi dan teknis yang memengaruhi keberlanjutan implementasinya.

Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan literasi digital aparatur desa. Meskipun sebagian besar perangkat desa telah mampu mengoperasikan SID, kemampuan penggunaan teknologi informasi masih belum merata. Beberapa aparatur masih memerlukan pendampingan ketika melakukan pembaruan data, pengelolaan basis data, maupun penyelesaian kendala teknis. Perbedaan tingkat penguasaan teknologi menyebabkan proses pelayanan pada kondisi tertentu belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi pada sistem digital perlu diikuti dengan pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Faktor kedua adalah ketidakstabilan jaringan internet. Seluruh proses pelayanan berbasis SID sangat bergantung pada koneksi internet. Ketika jaringan mengalami gangguan, proses pencarian data maupun penerbitan dokumen administrasi menjadi lebih lambat. Kondisi ini masih menjadi tantangan dalam implementasi digitalisasi pelayanan di wilayah perdesaan, terutama pada daerah yang kualitas jaringan telekomunikasinya belum sepenuhnya stabil. Tantangan infrastruktur tersebut relevan dengan pembahasan mengenai adopsi e-government di pemerintahan desa yang menempatkan kesiapan teknologi sebagai salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi sistem (Rahman et al., 2023).

Faktor berikutnya adalah keterbatasan anggaran operasional. Pengelolaan SID memerlukan biaya untuk pemeliharaan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, peningkatan kapasitas penyimpanan data, serta pelaksanaan pelatihan bagi aparatur desa. Apabila dukungan anggaran belum memadai, proses pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan akan berjalan lebih lambat. Dengan demikian, keberlanjutan digitalisasi membutuhkan perencanaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada pengadaan awal, tetapi juga pada pemeliharaan dan pengembangan sistem.

Selain itu, budaya kerja aparatur juga menjadi tantangan pada masa transisi dari sistem administrasi manual menuju sistem digital. Sebagian aparatur masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan prosedur kerja baru yang berbasis teknologi informasi. Perubahan budaya organisasi merupakan proses yang memerlukan pembiasaan, pelatihan, dan komitmen seluruh aparatur agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital pada pemerintahan desa merupakan proses perubahan organisasi, bukan sekadar proses penggantian media administrasi dari kertas menjadi digital.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi SID memiliki karakter yang multidimensional. Rahman et al. (2023) menekankan pentingnya memperhatikan aspek organisasi dan kesiapan dalam adopsi e-government, sedangkan Kurniawan dan Sari (2024) menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur, dukungan kelembagaan, dan pendampingan dalam

transformasi administrasi desa berbasis OpenSID. Dalam konteks Desa Lando, kedua perspektif tersebut terlihat pada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, menjaga stabilitas infrastruktur, menyediakan dukungan anggaran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur digital, penyediaan anggaran yang memadai, dan edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar implementasi SID dapat berlangsung secara optimal. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem yang telah diterapkan tidak berhenti pada tahap penggunaan awal, tetapi dapat berkembang menjadi bagian integral dari tata kelola pelayanan administrasi desa.

Tabel 1. Tabel Perbandingan SID di Kantor Desa Lando

Aspek Pelayanan	Sebelum Implementasi SID	Setelah Implementasi SID
Waktu Pembuatan Surat	15 - 20 Menit	< 5 Menit
Penyimpanan Data	Arsip Fisik / File Terpisah	Basis Data Terpusat & Terintegrasi
Akurasi Data	Rentan Kesalahan Ketik	Minim Kesalahan (Sesuai Master Data)

SIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Lando, Kecamatan Terara, membantu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan mempercepat pelayanan, meningkatkan keakuratan data, memudahkan pengelolaan arsip, serta mendukung pelayanan yang lebih transparan dan efisien. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan teknologi aparatur, jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, keberhasilan SID memerlukan peningkatan kompetensi aparatur, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, R., & Prasetyo, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 120–132.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadilah, N., & Hidayat, T. (2022). Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–58.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A. (2018). *Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, D., & Sari, M. (2024). Digital Transformation of Village Administration Through OpenSID. *Journal of Rural Governance*, 6(1), 23–39.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A., Yusuf, M., & Pratiwi, D. (2023). Electronic Government Adoption in Village Administration: Challenges and Opportunities. *International Journal of Public Administration*, 12(3), 210–223.
- Saputra, R., & Wibowo, A. (2021). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 88–101.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S., & Nugroho, H. (2022). Village Information System and Public Service Innovation in Rural Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 271–285.